

APAKAH SUBSIDI BBM SUDAH MENYASAR MASYARAKAT YANG TEPAT?

Farrel Adelia Yustin^{1*}, Jeremy Krisnanta Julian Adi², dan Sunday Noya³

^{1,2,3}Program Studi Teknik Industri, Universitas Ma Chung
Jalan Villa Puncak Tidar N-01, Doro, Karangwido, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia 65151

*Email korespondensi: 412310007@student.machung.ac.id

Received: 27 05 2026 – Revised: 29 06 2026 - Accepted: 07 07 2026 - Published: 01 08 2026

Abstrak. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta mendukung aktivitas perekonomian. Namun, dalam pelaksanaannya masih muncul pertanyaan mengenai apakah subsidi BBM telah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan sasaran subsidi BBM di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyalurannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi dokumenter. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti peraturan pemerintah, laporan lembaga resmi, serta artikel berita dari media yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi BBM, antara lain melalui penetapan kelompok penerima subsidi, penerapan Program Subsidi Tepat berbasis QR Code, registrasi pengguna BBM bersubsidi, serta penguatan pengawasan distribusi di SPBU. Meskipun demikian, berbagai data menunjukkan bahwa subsidi BBM belum sepenuhnya tepat sasaran. Sebagian besar konsumsi BBM bersubsidi masih dimanfaatkan oleh kendaraan pribadi dan kelompok masyarakat berpendapatan menengah hingga tinggi. Selain itu, masih ditemukan berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti pelansiran dan penyalahgunaan *barcode*, yang menyebabkan manfaat subsidi belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan sistem pendataan penerima, integrasi data sosial ekonomi, serta pengawasan distribusi yang lebih ketat agar subsidi BBM dapat disalurkan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kata kunci: Subsidi BBM, Ketepatan Sasaran, Kebijakan Publik, Program Subsidi Tepat, Pengawasan Distribusi.

PENDAHULUAN

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah agar masyarakat dapat membeli BBM dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, sekaligus mengurangi dampak kenaikan harga energi terhadap pengeluaran rumah tangga (Merdeka, 2026). BBM sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena digunakan di berbagai sektor, seperti transportasi, industri, pertanian, perikanan, serta distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi yang pada akhirnya memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok.

Untuk menjaga stabilitas tersebut, pemerintah memberikan subsidi BBM agar harga energi tetap terjangkau. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kestabilan harga barang, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi (Merdeka, 2026). Pelaksanaan subsidi BBM didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah yang mengatur seluruh penerimaan dan pengeluaran negara. Melalui APBN, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor, termasuk subsidi energi, sehingga penggunaan dana tersebut perlu dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Meskipun memiliki tujuan yang baik, pelaksanaan subsidi BBM masih menimbulkan berbagai perdebatan. Salah satu permasalahan yang sering dibahas adalah ketepatan sasaran penerima subsidi. Kondisi ini menyebabkan manfaat subsidi tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting mengingat anggaran subsidi BBM setiap tahun mencapai ratusan triliun rupiah dan bersumber dari APBN. Menurut (CNN Indonesia, 2026), Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyebutkan bahwa beban subsidi energi masih berada di atas Rp300 triliun per tahun dan sekitar 62,9% justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Temuan tersebut juga didukung oleh data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 yang dikutip CNN Indonesia, di mana Bank Dunia mencatat bahwa manfaat subsidi BBM masih lebih banyak diterima oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok berpendapatan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan pemberian subsidi dan pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, ketepatan sasaran subsidi BBM menjadi topik yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran negara serta upaya mewujudkan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan subsidi BBM telah menysasar masyarakat sebagai sasaran utama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan penyalurannya.

MASALAH

Meskipun pemerintah telah memberikan subsidi BBM untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan menjaga stabilitas ekonomi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang paling sering menjadi sorotan adalah ketepatan sasaran penerima subsidi. Dalam praktiknya, BBM bersubsidi tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga masih banyak digunakan oleh

kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang memiliki lebih banyak kendaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan awal pemberian subsidi belum sepenuhnya tercapai karena manfaatnya belum diterima secara merata oleh kelompok sasaran utama.

Permasalahan tersebut juga berdampak pada efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena subsidi BBM setiap tahun menghabiskan anggaran yang sangat besar. Apabila penyalurannya tidak tepat sasaran, penggunaan anggaran negara menjadi kurang optimal dan berpotensi mengurangi alokasi dana untuk sektor penting lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai apakah kebijakan subsidi BBM telah menasar masyarakat yang tepat serta faktor-faktor yang menyebabkan penyaluran subsidi masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemerintah.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumenter, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan subsidi BBM. Dokumen yang digunakan meliputi laporan pemerintah, hasil penelitian terdahulu, serta berita dari media yang relevan. Seluruh dokumen dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai ketepatan sasaran subsidi BBM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Subsidi BBM bagi Masyarakat dan Perekonomian

Pemberian subsidi BBM dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas perekonomian (Merdeka, 2026). Harga BBM yang lebih terjangkau membuat masyarakat, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah, tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang terlalu besar. Kondisi ini membantu menjaga daya beli karena penghasilan yang dimiliki masih dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penting lainnya, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan ini juga menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan harga BBM biasanya akan diikuti oleh meningkatnya biaya produksi dan distribusi barang, sehingga harga berbagai kebutuhan pokok ikut naik. Melalui subsidi, dampak tersebut dapat ditekan sehingga kenaikan harga barang tidak terjadi secara drastis.

Subsidi BBM juga berperan dalam mendukung sektor transportasi yang menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat. Biaya operasional kendaraan, baik

angkutan umum maupun kendaraan pengangkut barang, dapat tetap terkendali sehingga proses distribusi berjalan lebih lancar. Dampaknya, harga kebutuhan pokok di pasaran menjadi lebih stabil karena biaya pengiriman tidak mengalami peningkatan yang terlalu tinggi. Dari kondisi tersebut dapat dipahami bahwa subsidi BBM bukan hanya bertujuan menurunkan harga bahan bakar, tetapi juga menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau.

Mekanisme Penyaluran Subsidi BBM di Indonesia

Setelah memahami peran subsidi BBM dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian, penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran subsidi tersebut dijalankan. Penyaluran BBM bersubsidi diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Peraturan ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kelompok masyarakat dan sektor yang berhak menerima BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan kebijakan (MyPertamina.Id, 2026).

Berdasarkan peraturan tersebut, BBM bersubsidi dapat digunakan oleh kendaraan umum berpelat kuning, angkutan barang dengan ketentuan tertentu, kendaraan pelayanan umum seperti ambulans, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran, serta sektor produktif seperti nelayan, petani, usaha mikro, dan transportasi air yang telah memenuhi persyaratan. Penetapan kelompok penerima tersebut bertujuan agar subsidi lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan sektor yang benar-benar membutuhkan, sehingga anggaran APBN dapat dimanfaatkan secara lebih efektif (Muliawati, 2024).

Untuk mendukung ketepatan sasaran penyaluran subsidi, pemerintah juga menerapkan Program Subsidi Tepat melalui sistem *QR Code* yang dikelola oleh Pertamina. Melalui program ini, setiap kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi harus didaftarkan terlebih dahulu agar memperoleh *QR Code* yang hanya berlaku untuk satu kendaraan dan tidak dapat dipindahtangankan. Saat melakukan pembelian di SPBU, *QR Code* akan diverifikasi dengan data kendaraan sebagai bentuk pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Penerapan sistem digital ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi, meskipun efektivitasnya masih perlu dievaluasi secara berkelanjutan.

Tantangan dalam Penyaluran Subsidi BBM

Salah satu penyebab subsidi BBM belum sepenuhnya tepat sasaran adalah data penerima subsidi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Meskipun pemerintah telah menerapkan Program Subsidi Tepat melalui pendataan kendaraan, sistem tersebut masih berfokus pada identitas kendaraan dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi pemiliknya. Hal ini membuat masyarakat yang tergolong mampu masih berpeluang membeli BBM bersubsidi selama memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku (Next Indonesia, 2025).

Penyalahgunaan BBM bersubsidi juga menjadi penyebab belum optimalnya penyaluran subsidi. Praktik seperti penggunaan QR Code oleh pihak lain, pembelian BBM secara berulang melebihi kebutuhan, hingga penimbunan untuk dijual kembali masih ditemukan di beberapa daerah. Kondisi tersebut mengurangi kesempatan masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk memperoleh BBM bersubsidi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta penyempurnaan sistem pendataan agar subsidi BBM dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan pemerintah.

Analisis Ketepatan Sasaran Subsidi BBM

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi BBM. Hal tersebut terlihat dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur kelompok penerima BBM bersubsidi serta penerapan Program Subsidi Tepat melalui penggunaan QR Code pada aplikasi MyPertamina (MyPertamina.Id, 2026). Kebijakan tersebut bertujuan agar subsidi hanya dapat dinikmati oleh masyarakat dan sektor yang memang berhak menerimanya. Namun, meskipun berbagai mekanisme tersebut telah diterapkan, efektivitas penyaluran subsidi masih menjadi perhatian karena masih terdapat indikasi bahwa manfaat subsidi belum sepenuhnya diterima oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama (Liliyah, 2026).

Indikasi tersebut terlihat dari data yang dikutip oleh Djoko Setijowarno berdasarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) data menunjukkan bahwa sektor transportasi menyerap sekitar 91,2% dari konsumsi BBM nasional, tetapi 93% dari BBM subsidi di sektor transportasi darat justru digunakan oleh kendaraan pribadi, sementara itu angkutan barang hanya menggunakan sekitar 4% dan transportasi umum sekitar 3% (Alexander, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi dimanfaatkan oleh pengguna kendaraan pribadi dibandingkan dengan pengguna transportasi umum.

Padahal, apabila subsidi lebih banyak dialokasikan kepada angkutan umum dan sektor produktif lainnya, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam cakupan yang lebih luas.

Temuan tersebut diperkuat oleh data mengenai konsumsi Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Sebagian besar konsumsi Pertalite berasal dari masyarakat pada kelompok desil 5 hingga desil 10, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat pengeluaran menengah hingga tinggi. Bahkan, sekitar 39,99% konsumsi Pertalite dinikmati oleh 20% rumah tangga terkaya (desil 9–10) (CNN Indonesia, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penugasan BBM yang bertujuan menjaga keterjangkauan harga masih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang relatif mampu. Dengan demikian, manfaat kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih rendah.

Hasil tersebut juga sejalan dengan temuan Bank Dunia yang menyatakan bahwa manfaat subsidi BBM masih lebih banyak diterima oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi (CNN Indonesia, 2026). Selain itu, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyebutkan bahwa sekitar 62,9% subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat mampu, padahal pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi lebih dari Rp300 triliun setiap tahun melalui APBN (Muliawati, 2026). Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa ketepatan penyaluran subsidi sangat penting. Apabila sebagian besar manfaat masih diterima oleh kelompok yang tidak menjadi prioritas, maka efektivitas penggunaan anggaran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang optimal.

Berdasarkan berbagai data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem penyaluran subsidi BBM melalui berbagai kebijakan dan pemanfaatan teknologi. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa subsidi BBM belum sepenuhnya tepat sasaran, karena masih banyak dimanfaatkan oleh pengguna kendaraan pribadi dan kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah hingga tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan sistem pendataan, integrasi data penerima, serta pengawasan distribusi yang lebih baik agar anggaran subsidi yang telah dialokasikan pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih efektif bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Ketepatan Sasaran Subsidi BBM

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran subsidi BBM agar manfaatnya benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui reformasi kebijakan subsidi energi yang direncanakan dalam RAPBN 2027. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas penyaluran, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi. Di sisi lain, pemerintah juga tetap mempertimbangkan kondisi keuangan negara, keberlanjutan BUMN, daya beli masyarakat, serta kondisi perekonomian nasional sehingga kebijakan subsidi tetap dapat berjalan secara seimbang (Rachman, 2026).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap memberikan subsidi untuk BBM Solar dan minyak tanah, tetapi disertai dengan pengendalian volume penyaluran dan pengawasan terhadap kelompok masyarakat atau sektor yang memang berhak menerima subsidi. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran melalui sistem registrasi pengguna BBM bersubsidi. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa subsidi hanya dinikmati oleh penerima yang memenuhi kriteria. Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan kerja sama antara kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait dalam melakukan pengawasan serta pemutakhiran data penerima subsidi (Muliawati, 2024).

Selain melakukan perbaikan dari sisi kebijakan, pemerintah juga memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pemerintah secara rutin melakukan pemantauan di sejumlah SPBU untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelola SPBU juga diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan, terutama karena masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering ditemukan adalah praktik pelansiran, yaitu pengisian BBM bersubsidi secara berulang oleh kendaraan tertentu untuk kemudian dijual kembali. Oleh karena itu, kendaraan yang dicurigai melakukan pelansiran diminta untuk segera dilaporkan kepada pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti (BPH Migas, 2025).

Pemerintah juga mulai memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penggunaan sistem barcode bagi pengguna BBM bersubsidi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan penyalahgunaan, seperti penggunaan beberapa *barcode* oleh satu kendaraan untuk

memperoleh BBM subsidi dalam jumlah yang lebih besar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya memperketat pengawasan, termasuk memblokir *barcode* yang terbukti disalahgunakan serta membuka layanan pengaduan masyarakat melalui *Helpdesk* BPH Migas. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ketepatan sasaran subsidi BBM tidak hanya dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan, tetapi juga melalui pengawasan yang lebih ketat dan pemanfaatan teknologi agar penyaluran subsidi dapat berjalan lebih efektif (BPH Migas, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan subsidi BBM masih memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta mendukung aktivitas ekonomi melalui biaya transportasi yang lebih terjangkau. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi, dengan menerapkan Program Subsidi Tepat berbasis QR Code, melakukan registrasi pengguna BBM bersubsidi, serta memperketat pengawasan distribusi di SPBU. Namun, berbagai data menunjukkan bahwa penyaluran subsidi BBM belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini terlihat dari masih besarnya konsumsi BBM bersubsidi oleh kendaraan pribadi dan kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah hingga tinggi. Selain itu, masih ditemukan berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti pelansiran dan penggunaan *barcode* yang tidak sesuai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat subsidi belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga efektivitas penggunaan anggaran subsidi masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah perlu terus menyempurnakan sistem penyaluran subsidi BBM agar manfaatnya lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan data penerima subsidi dengan data sosial ekonomi nasional sehingga penentuan penerima tidak hanya didasarkan pada data kendaraan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penindakan tegas terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan anggaran subsidi BBM dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Program Studi Teknik Industri Universitas Ma Chung yang telah memberikan dukungan, fasilitas, serta bantuan pendanaan sehingga kegiatan penyusunan dan penyelesaian naskah ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, penulis turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan masyarakat yang telah berpartisipasi serta memberikan informasi, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dalam penyelesaian naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, B. H. (2026, April 12). Pakar ungkap BBM subsidi salah sasaran, kendaraan pribadi sedot 93 persen. Kompas.com. <https://www.kompas.com/properti/read/2026/04/12/201830721/pakar-ungkap-bbm-subsidi-salah-sasaran-kendaraan-pribadi-sedot-93?page=all#page2>
- BPH Migas. (2025, April 25). Pengawasan diperketat, penyaluran BBM subsidi dijaga tepat sasaran. BPH Migas. <https://www.bphmigas.go.id/pengawasan-diperketat-penyaluran-bbm-subsidi-dijaga-tepat-sasaran/>
- CNN Indonesia. (2026, Juni 12). Bank Dunia sebut 20 persen orang kaya RI nikmati setengah subsidi BBM. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260612182848-532-1368522/bank-dunia-sebut-20-persen-orang-kaya-ri-nikmati-setengah-subsidi-bbm>
- Liliyah, A. (2026, Juni 13). Subsidi BBM dinilai belum tepat sasaran, kelompok mampu masih nikmati porsi terbesar. SWA. <https://swa.co.id/read/473742/subsidi-bbm-dinilai-belum-tepat-sasaran-kelompok-mampu-masih-nikmati-porsi-terbesar>
- Merdeka, R. (2026, Juni 21). Pemerintah pertahankan harga BBM subsidi: Jaga daya beli dan stabilitas ekonomi nasional. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-pertahankan-harga-bbm-subsidi-jaga-daya-beli-dan-stabilitas-ekonomi-nasional-585108-mvk.html?page=4>
- Muliawati, D. F. (2024, Desember 23). Diumumkan awal 2025, ini bocoran kendaraan yang boleh isi BBM subsidi. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241223110247-4-598104/diumumkan-awal-2025-ini-bocoran-kendaraan-yang-boleh-isi-bbm-subsidi>
- Muliawati, D. F. (2026, Juni 9). Luhut blak-blakan, 62,9% subsidi energi RI dinikmati orang kaya! CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260609154252-4-741452/luhut-blak-blakan-629-subsidi-energi-ri-dinikmati-orang-kaya>
- MyPertamina.Id. (2026). Ketentuan pengguna BBM bersubsidi. MyPertamina.Id. <https://subsidiempat.mypertamina.id/syarat-ketentuan>
- Next Indonesia. (2025, Agustus 15). Sebagian besar BBM bersubsidi salah sasaran. Next Indonesia. <https://nextindonesia.id/Update/2025/08/15/157/Sebagian-Besar-BBM-Bersubsidi-Salah-Sasaran>
- Rachman, A. (2026, Juni 30). Rancangan awal RAPBN 2027, begini arah kebijakan subsidi BBM-listrik. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260630070946-4-746682/rancangan-awal-rapbn-2027-begini-arrah-kebijakan-subsidi-bbm-listrik>

